

**PENGARUH KEBIJAKAN STRATEGIC PATIENCE AMERIKA
SERIKAT TERHADAP PROGRAM PROLIFERASI NUKLIR DI KOREA
UTARA TAHUN 2010-2016**

Oleh:

Fajar Kurnia¹

(fajarkurniajr94@gmail.com)

Pembimbing : Faisal Rani S.IP , MA

Bibliografi : 02 Jurnal 16 Buku dan Publikasi Resmi, 05 Internet.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to reviewing the policy of Strategic Patience by United States toward North Korea. The policy contained was established by Obama Administration which concluded as neither stick neither carrot. The policy is concerned to pursue the North Korea to dismantle all of the nuclear facilities as the precondition of the further talks. However, I analyzed that the policy is a big fail because leaving North Korea behind the full-control of United States even this policy was strenghtened by trilateral cooperation among South Korea and Japan. This policy supported by acumulated sanction by Security Council and United States itself. At my final conclusion of this research, United States was failed to achieved its prominent interest; denuclrization of North Korea.

On an academic scope, this research is using the neorealism perspective and the theory of foreign policy. In the scope of theoretical, Foreign Policy emphasized the internal problema and internal policy are giving impact to the foreign policy. Indeed, indirectly, Foreign Policy Theory also pursued the comparative study by rolling back policies at the past. By the support of this theory, this research is capable to find out the failures of Strategic Patience.

The failure, instead, divided by several factor such as China Factor, the unassertive of the sanctions, the fragile of trilateral, and without neglecting the United Stated miscalculations; which made the circumstances of the failure.

United States' failures on denuclearized North Korea under Obama's term are the divergent interest inside United Nations Security Council itself. It showed by the renewal of UNSC Resolution 2321 which reflected the China's interest. Besides, the fail of Strategic Patience can be examined by United States was lacking its power at the region.

Keyword: United States, Nuclear Disarmament, North Korea, Strategic Patience, Obama Admnistration.

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau

PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya Perang Dingin, masalah keamanan di Semenanjung Korea menjadi pembahasan yang identik karena di kawasan tersebut merupakan hasil dari *Proxy War* di era Perang Dingin sebelumnya yang mengasilkan dua negara berbeda, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara berdasarkan perbedaan ideologi; liberalisme vis a vis sosialisme. Akhir dari Perang Dingin dimenangkan oleh Amerika Serikat beserta sekutunya dan peristiwa tersebut tidak menutup kemungkinan agar Amerika Serikat pergi dari kawasan-kawasan penyebaran militernya, namun justru tetap mempertahankan sebagai *bargaining position* di Asia Timur.

Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang memegang peranan penting didalam politik dunia internasional, terbukti dengan berbagai kebijakan-kebijakan politik AS yang menjadi sorotan sekaligus berdampak langsung maupun tidak langsung dalam tatanan global. AS memiliki power yang kuat untuk memuluskan segala kepentingan nasionalnya melalui peran pentingnya di Dewan Keamanan PBB. Begitu juga masalah yang selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan yaitu isu pengembangan nuklir Korea Utara. AS selalu agresif terhadap isu yang satu ini, terbukti dari banyaknya kebijakan AS untuk selalu mengancam Korea Utara dalam pengembangan nuklirnya dan dimulai pada tahun 2006 ketika uji nuklir Korea Utara yang pertama kalinya membuat ketegangan antar kedua negara semakin meningkat.

Korea utara adalah negara yang terletak dikawasan Asia Timur, yang berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Tiongkok dan Rusia di sebelah Utara, dan dengan Korea Selatan disepanjang zona demiliterisasi Korea. Batas barat Korea Utara adalah Sungai Kuning dan Teluk Korea. Sementara di Timur terdapat Jepang diseborang laut Timur (Laut Jepang).²Korea Utara memusatkan perhatiannya pada pengaktifan kembali reaktor nuklir, untuk melindungi negaranya jika adanya serangan dari Amerika Serikat. Pengembangan ini dilakukan karena Korea Utara merasa terancam dan tidak aman terhadap situasi di sekitarnya. Atas dasar itulah maka Korea Utara menganggap pengembangan dan pemilikan senjata-senjata nuklir masih tetap merupakan suatu pilihan yang terbuka bagi beberapa negara, baik karena pertimbangan militer, politik maupun ekonomi. Perasaan tidak aman karena timbulnya Amerika Serikat seringkali melakukan ancaman dan tekanan terhadap Korea Utara.³

Program nuklir Korea Utara dimulai pada tahun 1956 ketika sebuah perjanjian dengan Uni Soviet dalam kerjasama penggunaan damai energi nuklir ditandatangani. Dalam perjanjian ini, Korea Utara mulai mengirim para ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan dalam program Moscow yang bertujuan untuk melatih para ilmuwan dari negara Komunis lain.⁴

Uji coba nuklir Korea Utara pada 9 oktober 2006 membongkar kembali

² Caraway, Bill (2007). "Korea Geography"

³William J. Perry, "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political Science*, Vol. 607 (Sage Publications, Inc. 2006), hlm. 80.

⁴Uk Heo dan Jung-Yeop Woo, "The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress, and Prospects," *Korea Observer*, Vol. 39, No.4, (The Institute of Korean Studies, winter 2008), hlm. 490.

ingatan dunia internasional akan uji coba yang dilakukan oleh negara-negara pemilik senjata nuklir sebelumnya. Reaksi keras, ketakutan, dan kekhawatiran akan dampak uji coba nuklir ini mengundang beragam pihak melakukan reaksi yang berbeda terhadap Korea Utara. Reaksi paling keras muncul dari kelompok enam Negara yang selama ini telah melakukan diplomasi multilateral (*Six party talks*) untuk menggagalkan ambisi nuklir Korea Utara, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Bahkan reaksi keras ini diwujudkan dalam bentuk resolusi PBB 1718 tanggal 14 oktober 2006 yang secara garis besar berisi larangan uji coba nuklir bagi Korea Utara.⁵

Korea Utara berusaha untuk mengembangkan nuklir. Program nuklir yang dilakukan Korea Utara pada masa ini memiliki tujuan:⁶

1. Meningkatkan kekuatan untuk mencapai posisi setara dengan Korea Selatan
2. Menambah kewibawaan dan pengaruh Korea Utara dalam hubungan antar negara di dunia
3. Digunakan sebagai sarana pemerasan agar mendapatkan keuntungan dari Korea Selatan
4. Sebagai strategi penyeimbang terhadap persenjataan Korea Selatan.

Sementara itu alasan politis Korea Utara lebih dilandasi kepentingan untuk menaikan posisi tawar (*bargaining position*) Korea Utara di tingkat internasional. Ini berkaitan dengan sikap komunitas internasional yang berusaha mengasingkan dan bersikap keras terhadap Korea Utara. Senjata nuklir

akan digunakan untuk menekan komunitas internasional agar melibatkan Korea Utara di dalam percaturan global. Selain juga untuk memajukan kepentingan-kepentingan Korea Utara seperti, mencabut sanksi keuangan internasional yang diterimanya.⁷Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini merupakan dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait kompetisi ekonomi memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi.

Terkait permasalahan tersebut, Amerika Serikat membuat sebuah kebijakan luar negeri khusus permasalahan pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Kebijakan tersebut adalah *Strategic Patience* yang merupakan keberlanjutan dari kebijakan-kebijakan lain (sanksi internasional) Amerika Serikat terhadap Korea Utara. Kebijakan khusus *Strategic Patience* mengedepankan pendekatan persuasif dengan membuka hubungan diplomatik, mengajak Korea Utara kembali untuk masuk ke dalam *Six-Party Talks*, dan jalan kepada denuklirisasi. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan *Strategic Patience* memiliki beberapa poin prioritas, seperti melanjutkan komitmen untuk denuklirisasi, kemauan untuk terlibat (berdasarkan beberapa kondisi), dedikasi kepada tujuan-tujuan serta proses *Six-Party Talks*, dan berusaha untuk bekerja atas dasar prinsip multilateral untuk memberikan sanksi dan menekan Korea Utara.⁸ Pada dasarnya, kebijakan ini lebih berbeda dibanding

⁵RR. Emilia Yustiningrum, *Masalah Senjata Nuklir dan Masa Depan Perdamaian Dunia*

⁶*Op Cit*

⁷*Ibid*

⁸Pritchard, L. Charles dan Tielli Jr, Jhon H. *U.S Policy Toward the Korean Peninsula.*

kebijakan sebelumnya yang sarat akan hubungan langsung antar negara.

Pada Februari tahun 2010, Pentagon merilis data dari badan *Ballistic Missile Defense Review* bahwa jika Korea Utara tetap melanjutkan program pengembangan nuklir dan misil dengan lintasan (*trajectory*) yang sama, Korea Utara akan memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk meluncurkan nuklir ke negara-negara tetangganya bahkan sampai dengan territorial Amerika Serikat.⁹*Strategic Patience* yang dikemukakan oleh masa pemerintahan Obama memiliki karakteristik utama, yaitu bersikap reaktif terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara namun agresif secara multilateral untuk menekan Korea Utara.

Akan tetapi, setelah menurut analisis ilmuwan Universitas Stanford, Siegfried Hecker, upaya Korea Utara untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor ringan telah menuju kepada keberhasilan, sehingga AS mengadakan tiga kali pembicaraan langsung dengan Korea Utara pada Juli 2011 hingga Februari 2012. Upaya AS mengejar negosiasi bilateral dengan Korea Utara merupakan usaha untuk memastikan bahwa perundingan bilateral tersebut tidak membuka kesalahpahaman bagi Seoul atau Tokyo.¹⁰

Independent Task Force Report No. 64. Council on Foreign Relations. New York. 2010. Hal. 9.

⁹*Ibid.* Hal. 10. *Ballistic Missile Defense Review Report* (Washington, DC: U.S. Department of Defense, February 2010).

¹⁰(Council on Foreign Relations, 2013 melalui <http://www.cfr.org/north-korea/us-policytoward-north-korea/p29962> diakses 3 Desember 2016).

Tinjauan Pustaka

1. Teori Kebijakan Luar Negeri (*Foreign policy*)

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit internasional lain, dan diarahkan untuk mencapai tujuan nasional. Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapapun yang berkuasa pada waktu itu.¹¹ Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.¹² Dalam kebijakan luar negerinya setiap negara memiliki tujuan-tujuan atau pun kepentingan-kepentingan tertentu. Adapun tujuan dari kebijakan luar negeri dari suatu negara adalah fungsi dari proses dengan bagaimana tujuan tersebut disusun. Kebijakan luar negeri merupakan tanggapan terhadap struktur kebutuhan internalnya, hal ini mencerminkan tanggapan terhadap tekanan lingkungan baik internal maupun eksternalnya.¹³

Politik luar negeri suatu negara dipastikan mengarah kepada promosi kepentingan nasional suatu

¹¹Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta, LP3ES, 1994), hal. 184.

¹²James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal 27

¹³T May Rudy, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin*, cetakan pertama, Bandung, PT Refika Aditama. 2002.

negara termasuk juga negara Amerika Serikat. Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi. Namun pada dasarnya politik luar negeri tidak pernah pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional.

Beberapa aktor yang memegang peranan penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat yaitu:

1. Presiden berperan sebagai penyelenggara politik luar negeri melalui departemen luar negeri dan menunjuk dan memberhentikan duta besar (atas persetujuan kongres)
2. Kongres berperan dalam menunjuk duta besar dan menyetujui ataupun meratifikasi pembuatan kebijakan yang di buat oleh presiden.
3. Senat dan *house of representative* berperan dalam mengeluarkan resolusi ataupun menolaknya
4. Departemen yang berperan dalam penyelenggaraan secara *administrative* politik luar negeri Amerika Serikat.

Suatu negara menggunakan politik luar negerinya, untuk menjalin hubungan dengan negara lain, yang meliputi semua kebijakan yang

diambil oleh suatu negara yang memiliki pengaruh terhadap hubungan antar pemerintah dengan pemerintah yang lain.¹⁴Politik luar negeri suatu negara berarti pencapaian tujuan-tujuan, yang dicapai di luar batas yurisdiksi nasional. Esensi dari politik luar negeri merupakan rencana dan kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada tujuan yang satu yakni perwujudan kepentingan nasional demi mempertahankan kelangsungan hidup negara. Sehingga setiap pengambilan kebijakan luar negeri, suatu negara selalu mendasarkan pada kepentingan nasional.

Dalam kebijakan politik luar negeri terdapat tipe keputusan yang akan diambil oleh pembuat keputusan di suatu Negara.

Tipe-tipe keputusan tersebut antara lain: keputusan makro (*macro decisions*), keputusan mikro (*micro decisions*), dan keputusan krisis (*crisis decisions*). Makro merupakan suatu garis besar umum yang dipergunakan sebagai petunjuk bagi organisasi pemerintahan yang sehari-hari bertanggung jawab mengarahkan keputusan-keputusan rutin dalam implementasi kebijakan luar negeri. Keputusan mikro dikenal sebagai keputusan administrasi dan biasanya dibuat lebih rendah dari organisasi pemerintahan, dan biasanya dikerjakan secara individu bukan oleh kepemimpinan politik. Sedangkan keputusan krisis adalah keputusan yang mirip dengan keputusan mikro, namun merupakan keputusan kecil yang melibatkan pembuatan keputusan tingkat tinggi. Keputusan ini sangat mempengaruhi keamanan

¹⁴T.B. Millar, "on Writing About Foreign Policy", dalam James N. Rosenau (ed),

International Politics and Foreign Policy, New York: The Fice Press, 1969, hal. 57

nasional dan keamanan kawasan ataupun global.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat komparatif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk membandingkan antara komponen-komponen yang berkenaan dengan masalah dan fenomena yang diteliti. Metode kualitatif lebih menyesuaikan dan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola yang dihadapi. Metode kualitatif berasumsi pada kenyataan, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dengan menelaah berbagai kajian-pustaka yakni mengumpulkan dan mencari data dari berbagai sumber bacaan, yakni buku, jurnal, artikel, internet, dan bacaan lainnya yang relevan dengan bacaan yang dibahas.

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Hubungan Politik Amerika Serikat dan

Korea Utara Mengenai Program Proliferasi Nuklir

Korea Utara merupakan salah satu negara yang menjadi fokus langsung dari Amerika Serikat, khususnya di Asia Timur pasca Perang Dingin. Amerika Serikat belum pernah memiliki hubungan diplomatik yang resmi dengan Korea Utara dan negosiasi mengenai program proliferasi nuklir telah berjalan tiga masa pemerintahan Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini tercerminkan pada beberapa perhatian politik Amerika Serikat terkait permasalahan ini, seperti keamanan, politik, dan hak asasi manusia. Hal itu dikarenakan kekhawatiran Amerika Serikat pada jalur (*trajectory*) dan jarak tempuh misil dari Korea Utara. Respon dari Amerika Serikat adalah menempatkan lapangan militer angkatan laut (*US Navy*) di beberapa tempat di kawasan tersebut untuk menghentikan jika sewaktu-waktu Korea Utara meluncurkan misilnya. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga menempatkan pasukan angkatan udaranya untuk memastikan kawasan tersebut dengan menempatkan pesawat peledak (*heavy bomber*) di daerah Guam, Korea Selatan dan juga Jepang.¹⁵

1.2 Six-Party Talks

Pasca dari gagalnya kesepakatan bersama antara Amerika Serikat dan Korea Utara mengenai pengembangan nuklir, di bawah masa pemerintahan George W. Bush Jr, negosiasi tersebut meluas dengan melibatkan aktor-aktor dari negara lain, khususnya Cina, Korea Selatan,

¹⁵<https://www.bbc.com/news/world-asia-41095772> diakses pada 12 Juni 2018.

Jepang, dan Rusia yang tergabung dalam perundingan khusus bernama “*Six-Party Talks*”. Tujuan dibentuknya kelompok perundingan ini adalah untuk mengidentifikasi tindakan selanjutnya terkait keamanan dan stabilitas di Semenanjung Korea dan perundingan ini ditujukan kepada Korea Utara terkait program pengembangan senjata nuklirnya yang dimulai sejak tahun 2003 se usai keluarnya Korea Utara dari *Nuclear NPT*.¹⁶

Dalam perundingan tersebut, negara-negara yang tergabung di dalamnya memiliki peran dan kepentingannya masing-masing, seperti:¹⁷

1. Cina

Cina merupakan negara utama sebagai aliansi perdagangan Korea Utara yang sudah banyak membantu Korea Utara berupa bantuan kemanusiaan dan bantuan energi dengan jumlah yang sangat besar. Dikarenakan hubungan yang erat ini, Cina memiliki peran yang vital dalam perundingan ini untuk mempertahankan stabilitas keamanan di kawasan Pyongyang karena jika hal ini gagal dan menimbulkan tensi yang lebih tinggi akan menyebabkan Korea Utara menerima banyak pengungsi. Di samping itu, keamanan regional harus tetap terjaga mengingat pertumbuhan ekonomi Cina sedang meningkat.

2. Korea Utara

Korea Utara telah menyatakan bahwa pengembangan senjata nuklir akan sangat membantu dalam keuntungan keamanan nasionalnya. Produksi energi juga menjadi perhatian utama bagi Korea Utara mengingat keadaan ekonomi yang sangat rendah dan banyak warga yang meninggal karena kelaparan, dalam *Six-Party Talks*, Korea Utara berusaha untuk mendapatkan keamanan, energi, dan keuntungan ekonomi.

3. Jepang

Jepang hanya memiliki sedikit kepentingan seperti jelas bagi Jepang bahwa senjata nuklir yang dikembangkan Korea Utara akan sangat berbahaya bagi keamanan nasional Jepang. Selain untuk menekankan pada jalan denuklirisasi, Jepang juga menyelipkan kepentingannya terkait penculikan warga Jepang oleh pemerintah Korea Utara.

4. Rusia

Kepentingan dan pengaruh Rusia hanya sedikit, mengingat hubungan perdagangan antara Rusia dan Korea Utara mengalami penurunan (pra-2003). Dikarenakan perbatasan yang berdekatan, Rusia menekankan pada arus pengungsi yang akan meningkat yang disebabkan oleh konflik ini.

5. Korea Selatan

Pada tahun 1953, Korea Utara, Cina, dan Amerika

¹⁶*Six-Party Talks*. Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes

Center for Nonproliferation Studies. 2011. SP-1.

¹⁷*Ibid.* Hal. 1-3.

Serikat meraih gencatan senjata yang mengakhiri Perang Korea. Akan tetapi, perjanjian ini tidak ditandatangani oleh mantan presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, maka dari itu, Korea Selatan dan Korea Utara tetap berperang. Dalam hal ini, Korea Selatan menginginkan agar program pengembangan senjata nuklir Korea Utara segera dihentikan dikarenakan akan memengaruhi secara langsung terkait ancaman keamanan pada perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea..

6. Amerika Serikat
Pernyataan Amerika Serikat hampir sama dengan Rusia, yaitu menghentikan program pengembangan senjata nuklir Korea Utara untuk mencegah proliferasi yang dilakukan oleh negara atau non-negara. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan komitmennya untuk melindungi Korea Selatan atas dasar perjanjian *Mutual Security Agreement* tahun 1953.

1.3 *Strategic Patience Policy*

Pemerintahan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama telah menerapkan kebijakan *Strategic Policy* sebagai respon terhadap permasalahan nuklir di Korea Utara. Kebijakan tersebut lebih menekankan pada kedudukan yang pasif dalam mengambil tindakan. Hal

tersebut jelas dibuktikan dengan peran Amerika Serikat yang menunggu tindakan-tindakan yang diambil oleh Korea Utara untuk dijadikan objek fokus tindakan yang diambil. Pada sisi yang bersebarangan, kebijakan ini merupakan kebijakan reaktif terhadap negara-negara tetangga Korea Utara di Asia Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada inti dari kebijakan *Strategic Patience*, yaitu memaksa Korea Utara untuk mengambil langkah yang progressif dalam melakukan denuklirisasi dan memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan sebagai langkah awal untuk membuka lagi dialog *Six-Party Talks*, terus menjalankan komunikasi dengan aliansi seperjanjian (*treaty allies*) yaitu Jepang dan Korea Selatan, meyakinkan Cina untuk mengambil langkah yang tegas kepada Korea Utara, menekan dengan keras Korea Utara dengan sanksi dan larangan persenjataan.¹⁸

Berdasarkan kebijakan tersebut, Amerika Serikat mengatakan bahwa negaranya sedang mencari kesepakatan yang tepat dengan Korea Utara agar program pengembangan senjata nuklir dihentikan dan sebagai balasannya Amerika Serikat akan memberikan bantuan kemanusiaan dan ekonomi kepada Korea Utara, namun Amerika Serikat sangat memaksa pada penghentian program senjata nuklir tersebut dan pemberlakuan moratorium pada percobaan nuklir sebelum negosiasi dapat dimulai kembali. Di saat yang bersamaan, kebijakan ini juga dikawal oleh latihan militer dengan skala besar

¹⁸Chanlett-Avery, Emma dan Rinehart, E. Ian. *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situations*.

Congressional Research Service Report. Washington DC. 2014. Hal. 7-8.

dengan tujuan memperlihatkan kekuatan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan.

2. Aktivitas Amerika Serikat dalam *Strategic Patience* terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara

Kepentingan Amerika Serikat di masa Obama tercermin dalam pernyataannya mengenai sikap Amerika Serikat kepada Korea Utara setelah sekian banyak naik-turunnya proses penghentian senjata nuklir Korea Utara. Dalam strategi ini, Amerika Serikat menempatkan posisinya sebagai negara yang merespon, bukan lagi yang memulai aksi. Akan tetapi, di satu sisi, Amerika Serikat menggencarkan pengaruhnya di kawasan Asia Timur, khususnya dengan negara-negara tetangga Korea Selatan dan tidak terkecuali memasifkan kehadiran militernya dengan Korea Selatan.

2.1 Program Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara

Perhatian Amerika Serikat semakin meningkat sejak Korea Utara menerapkan pengembangan nuklirnya sebagai prioritas utama untuk keamanan nasionalnya. Meski pun Korea Utara telah dikecam dan diberikan sanksi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, Korea Utara tetap melakukan peluncuran roket jarak jauhnya yang membawa muatan satelit di tahun 2012 dan pada tahun 2014 Korea Utara meluncurkan roket misil balistik jarak pendeknya sebanyak 10 buah. Di samping itu, Korea Utara memiliki 700 arsenal

roket jarak pendek balistik nuklir desain Soviet, meski pun senjata nuklir ini terkesan kuno, namun tetap saja hal tersebut digunakan untuk kepentingan militer Korea Utara.¹⁹ Laporan dari pemerintahan Amerika Serikat menyebutkan bahwa Korea Utara telah menyebarkan roket misil balistik jarak pendek dan jarak menengah sekitar 100 dan kurang dari 30 pada tahun 2013 setiap roketnya yang dapat mencapai Jepang dan markas militer Amerika Serikat di kawasan tersebut meski pun roket jarak menengah belum pernah dilakukan peluncuran uji coba sebelumnya.

Misil	Bahan Pembakar	Mode Penyebaran	Jarak Maksimum (Km)	Jumlah yang dimiliki Korea Utara
SCUD B	Cairan	Road-mobile	300	Kurang dari 100
SCUD C	Cairan	Road-mobile	500	
Toкса	Padat (<i>solid</i>)	Road-mobile	120	
ERSCUD	Cairan	Road-mobile	700-995	

¹⁹Fitzpatrick, Mark. *North Korean Security Challenges: A Net Assessment*. International

Institute for Strategic Studies. London. 2011, Hal. 144-146.

Karakteristik Roket Misil Jarak Pendek (*Short-Ranged Ballistic Missile*) Korea Utara²⁰

Kemampuan Korea Utara untuk mengecilkan hulu ledak nuklirnya menjadi misil balistik, khususnya *Intercontinental Ballistic Missile* (ICBM), adalah kunci utama dalam perhatian Amerika Serikat. Pihak pemerintah Amerika Serikat melaporkan bahwa Korea Utara telah mengembangkan ICBM dengan sistem penggunaan *road-mobile* yang disebut KN-08 meski pun misil tersebut belum pernah diujicoba untuk diluncurkan. Di saat yang bersamaan, beberapa analisis menemukan gambaran satelit komersial bahwa Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba mesin roket untuk KN-08 meski pun sistem dari roket tersebut masih jauh dari pengembangan. Selain itu, pada tahun 2014, Laksamana Samuel Locklear selaku Komandan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk Komando Pasifik mengatakan bahwa Korea Utara sangat dekat untuk menempatkan (*fielding operational*) roket KN-08 dan ICBM terus menjadi perhatian utama.²¹

2.2 Hubungan Luar Negeri

Dalam hal ini, Amerika Serikat memberikan perhatiannya kepada hubungan luar negeri Korea Utara yang masih berkaitan dengan

program pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Hal tersebut dikarenakan penjualan bagian-bagian misil (*missile parts*) Korea Utara kepada negara-negara lain (pasar gelap), negara tersebut melingkupi Mesir, Iran, Myanmar, Pakistan, Uni Emirat Arab dan Yaman.²² Dalam konteks ini, Amerika Serikat tidak hanya berfokus pada pengawasan terhadap hubungan luar negeri Korea Utara, namun juga membentuk poros khusus untuk menghadang masifnya aktivitas Korea Utara. Amerika Serikat membentuk kerjasama trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan sikap berupa pentingnya kerjasama trilateral untuk normalisasi tensi yang ada di Semenanjung Korea dan sepakat untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270²³ yaitu mengenai pemberian sanksi terhadap Korea Utara.²⁴

3. Sanksi PBB Terhadap Korea Utara

Dalam *Strategic Patience*, Amerika Serikat memaksimalkan perannya dengan cara intervensi secara tidak langsung yaitu dibuktikan dengan membekukan aset-aset milik Korea Utara, mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres/*Executive Orders/EO*) yang memiliki tujuan

²⁰*Ballistic and Cruise Missile Threat*. Laporan dari National Air and Space Intelligence dengan kontribusi Defense Intelligence Agency Missile and Space Intelligence Center dan Office of Naval Intelligence. NASIC Public Affairs Office NASIC/PA 4180 WATSON WAY WRIGHT-PATTERSON AFB, OH 45433-5625. 2013. Hal. 13.

²¹*Loc. Cit.* Chanlett-Avery, Emma dan Rinehart, E. Ian. Hal. 15.

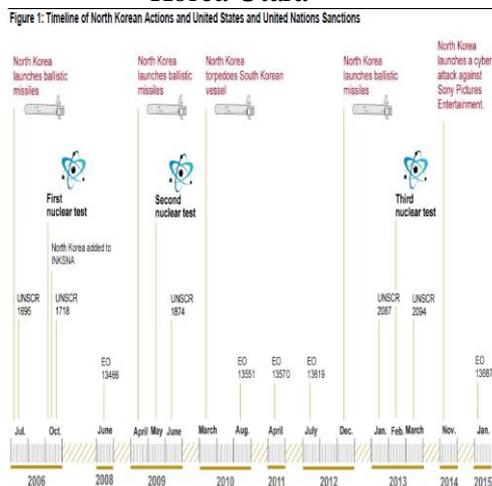
²²*Jane's Sentinel Security Assessment—China and Northeast Asia*, January 22, 2010 and IISS (2011), Hal. 180-181.

²³http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=40846 Diakses pada 24 Juni 2018.

²⁴UN Press. *Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270* (2016). Diakses melalui <https://www.un.org/press/en/2016/sc12267.doc.htm> pada 24 Juni 2018.

untuk nonproliferasi nuklir. Perpres tersebut tercantum dalam *Presidential Executive Orders* 13382, 13466, 13551, 13570, 13619, dan 13687.²⁵ Pemberian sanksi kepada Korea Utara merupakan hasil negosiasi Amerika Serikat di kancah internasional (Dewan Keamanan PBB, forum internasional lainnya) dan juga regional (kerjasama trilateral antara Jepang dan Korea Selatan).

Alur Waktu Pemberian Sanksi dari Amerika Serikat dan PBB kepada Korea Utara²⁶



Gambar 3.3

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pemberian sanksi kepada Korea Utara tidak hanya melalui kebijakan Amerika Serikat saja melalui perpresnya, namun juga melalui Dewan Keamanan PBB sebagai media lain bagi Amerika Serikat untuk melanggengkan kebijakannya terhadap program proliferasi nuklir Korea Utara.

²⁵Cha, D. Victor. *Assessing the North Korea Threat and U.S Policy: Strategic Patience or Effective Deterrence?*. Statement before the Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on East Asia, the Pacific, and International Cybersecurity Policy. Washington DC. 2015. Hal. 4.

²⁶United States Government Accountability Office (GAO), Report to the Chairman,

Mengenai perpres Amerika Serikat (*Executive Orders and Law Specific to North Korea*) sebagai sanksi, di bawah ini;²⁷

INKSA (2006)

- Mentransfer atau memperoleh barang dari Korea Utara dan barang-barang tersebut telah ditentukan oleh rezim pengawasan ekspor multilateral, atau barang-barang lain yang dapat berkontribusi dalam membangun sistem senjata pemusnah masal (*Weapon Mass Destruction/WMD*) atau kapal atau sistem misil balistik.

EO 13551 (2010)

- Menimpor, mengekspor, atau melakukan *reexporting*, kepada Korea Utara berupa senjata atau material yang berkaitan dengan sistem pembangunan senjata nuklir
- pencucian uang, pemalsuan barang atau mata uang (*currency*), penyelundupan uang dalam skala besar, penyeludupan narkoba, atau aktivitas ekonomi terlarang lainnya yang akan membantu pemerintahan Korea Utara.
- Berusaha untuk terlibat dalam kegiatan yang dilarang dalam perintah ini.

EO 13619 (2012)

Committee of Foreign Relations. U.S Senate. *United States Has Increased Flexibility to Impose Sanctions, but United Nations Is Impeded by a Lack of Member States Reports*. GAO-15-485 North Korea Sanctions. 2015. Hal. 6. Lebih lanjut, INKSA adalah *Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act*.
²⁷*Ibid*. Hal. 7-8.

- Melakukan impor, ekspor, atau *reexporting* atau menjual atau membeli senjata dan material terkait dari Korea Utara atau pemerintahan Korea Utara ke Pemerintahan Burma atau pun sebaliknya.
- Menjadi petugas (*senior officer*) dari hal-hal yang berkaitan yang kegiatan-kegiatan terlarang di territorial di atas (Korea Utara dan Burma).
- Menyediakan finansial, material, atau dukungan teknologi, atau barang dan jasa yang akan membantu aktivitas terlarang yang sebagaimana di atur di atas sebagai pihak yang terlibat dalam menggagalkan perintah ini.

EO 13687 (2015)

- Menjadi pihak utama, pihak perantara, pihak yang mengatur kegiatan-kegiatan tersebut, menjadi bagian dari pemerintahan Korea Utara, dan menjadi bagian dari Partai Buruh Korea Utara.
- Menyediakan bantuan finansial, material, atau dukungan teknologi, atau bantuan berupa barang dan jasa, yang akan menghalangi tujuan dari kebijakan ini.

4. Gagalnya *Strategic Patience* dalam Program Proliferasi Nuklir Korea Utara

4.1 Tujuan *Strategic Patience*

²⁸Clinton Calls 'Exploratory' Meeting with North Korea 'Quite Positive'. Voice of America. 2009. Diakses melalui <https://www.voanews.com/a/clinton-calls->

Sejak permasalahan program proliferasi senjata nuklir Korea Utara menjadi salah satu isu utama Amerika Serikat pada masa pemerintahan Obama sampai tampuk kepemimpinan Amerika Serikat digantikan oleh Trump, kebijakan *Strategic Patience* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Obama, tidak menimbulkan hasil yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan sifat dari kebijakan tersebut yang sebenarnya adalah kebijakan yang reaktif, yaitu menunggu Korea Utara untuk segera melakukan denuklirisasi dan kembali bergabung dalam dialog khusus yang membahas tentang hal tersebut, yaitu *Six-Party Talks*. Kebijakan *Strategic Patience* merupakan hasil dari perumusan para perumus kebijakan yang ada di dalam pemerintahan Obama dan dicetuskan oleh Hillary Clinton untuk publik, bahwa *Strategic Patience* merupakan satu-satunya pendekatan yang dapat dilakukan Washington kepada Korea Utara untuk kembali masuk ke dalam dialog *Six-Party Talks* (kebijakan yang paling tepat dengan aliansi dalam *Six-Party Talks*) dan setelahnya dapat dilakukan progres dari tujuan denuklirisasi di Korea Utara.²⁸

4.2 Aktivitas Amerika Serikat Berdasarkan *Strategic Patience*

Amerika Serikat terjebak pada *agenda setting*-nya sendiri yang dilandasi dengan *Strategic Patience* karena memberikan harapan kepada Cina untuk berhadapan dengan Korea Utara sangat dapat diragukan namun di saat yang bersamaan tidak dapat dipungkiri bahwa meyakinkan Cina sebagai negara yang terancam akibat

[exploratory-meeting-with-north-korea-quite-positive-78980687/416329.html](https://www.voanews.com/a/exploratory-meeting-with-north-korea-quite-positive-78980687/416329.html) pada 27 Juni 2018.

pengaruh Korea Utara adalah hal yang tepat bagi Amerika Serikat. Terlebih lagi bahwa posisi, pengaruh, dan peran Cina pada Korea Utara dan pada kawasan tersebut merupakan satu-satunya pilihan Amerika Serikat untuk meraih kepentingannya. Bagaimana pun, jika dibandingkan dengan sikap Amerika Serikat sebelum era Obama, Amerika Serikat dengan *Strategic Patience*-nya dapat dikatakan lebih cermat jika dihitung dengan wacana ideal kebijakan dengan mengutamakan pengaruh di kawasan tersebut, namun kebijakan ini memiliki kelemahannya sendiri, yaitu memberikan Korea Utara waktu untuk mengatur agenda kepentingannya dan hal tersebut bertentangan dengan opsi diplomatik Amerika Serikat. Singkatnya, Amerika Serikat menempatkan dirinya beserta aliansi untuk bersikap reaktif dan gagal dalam menggunakan cara-cara diplomatik.²⁹

Akibat dari pengaruh dari *Strategic Patience* selanjutnya adalah menguatnya pengaruh militer Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan di Laut Kuning. Jika dibandingkan, Amerika Serikat yang kewalahan dalam penguatan pengaruh militernya di Irak dan Afghanistan namun kedua negara tersebut masuk di kategori wilayah Pasifik dan di saat yang bersamaan, Amerika Serikat menjadi lebih diterima di kawasan Asia Timur dan Tenggara karena insiden ini. Alhasil, dari hal ini pula timbul keraguan Cina untuk memasifkan hubungan dengan Amerika Serikat beserta aliansinya

²⁹Svenson, Roger. *The Limits of "Strategic Patience"*. Policy Brief. Institute for Security & Development Policy. No. 47. Stockholm. 2010. Hal. 1-2.

³⁰*Ibid.* Hal. 2.

untuk permasalahan nuklir Korea Utara. Aktivitas Korea Utara kemudian tidak hanya menyulitkan Amerika Serikat beserta aliansinya, namun juga Cina yang mana hal ini dikarenakan penguatan hubungan militer antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan di Laut Kuning yang merupakan masih kawasan teritorial Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Cina.³⁰

Sanksi dari PBB kepada Korea Utara sudah masif dari berbagai lini. Dimulai dari embargo ekonomi, sampai sanksi sosial yang membuat Korea Utara semakin terisolasi, namun nyatanya tidak. Sebuah analisis dari *Carnegie Endowment for International Peace* menyatakan bahwa terdapat miscalculasi pada penetapan kebijakan sanksi kepada Korea Utara, tepatnya sanksi untuk melakukan embargo minyak kepada Korea Utara. Sanksi tersebut diaplikasikan setelah dari peluncuran misil ICBM yang lebih maju (*advance*) dan secara bersamaan dengan pemberian sanksi berdasarkan Resolusi DK PBB. Sanksi tersebut diberikan oleh Cina dengan cara mereduksi jumlah ekspor minyak kepada Korea Utara. Akan tetapi, memangkas suplai minyak kepada Korea Utara merupakan hal yang tergesa-gesa.³¹

5. China Factor dan Kompleksitas Resolusi DK PBB

Terdapat juga faktor tambahan yang membuat *Strategic*

³¹Zhao, Tong. *Why an Oil Embargo Won't Stop North Korea*. Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy. 2017. Diakses melalui <https://carnegietsinghua.org/2017/12/01/why-oil-embargo-won-t-stop-north-korea-pub-74889> pada 30 Juni 2018.

Patience tidak memiliki daya apa pun untuk mempengaruhi Korea Utara. Dikarenakan stabilnya Korea Utara dan pergantian rezim di Korea Utara yang digantikan dengan Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara tersebut melakukan perubahan dan pembersihan personal. Di saat yang bersamaan, Korea Utara mulai menurunkan tensi provokasi senjata nuklirnya dan dilanjutkan dengan meningkatkan perhatiannya pada pengembangan ekonomi. Pada tahap ini, Korea Utara belajar dari pengalaman negara tetangganya, yaitu Cina, sebab dapat dianalogikan bahwa sejarah dan perjalanan pembangunan negara Korea Utara dapat dikatakan sama dengan sejarah dan perjalanan pembangunan negara Cina. Hal tersebut dapat dilihat dari fokus utama dari strategi *Byongjin Line* yang digunakan oleh Kim Jong Un. Landasan utama dari strategi Korea Utara tersebut adalah menggeser fokus kebijakan pengembangan militer sebagai prioritas namun tidak melupakan pada bidang pengembangan ekonomi.³²

Sikap Cina yang tidak konsisten terhadap kesepakatan untuk memberika sanksi kepada Korea Utara ini menjadi salah satu hal penting dalam melihat gagalnya *Strategic Patience* Amerika Serikat yang mengedepankan pengaruhnya pada kawasan dan menunggu Korea Utara untuk segera menghentikan, bahkan membongkar (*dismantle*) semua fasilitas nuklirnya. Cina gagal diraih oleh Amerika Serikat dan memberikan kesan bahwa aliansi yang dibangun Amerika Serikat

dengan Cina di dalamnya tidak memiliki satu pandangan dan sangat rentan untuk terpecah belah.

Selain itu, dalam ranah internal PBB sendiri, setelah ditetapkannya Resolusi 2270, PBB kembali mengadopsi draft resolusi yang lebih baru karena provokasi ujicoba nuklir kelima Korea Utara. Resolusi tersebut adalah Resolusi 2321. Dalam proses penetapan Resolusi 2321 ini, anggota Dewan Keamanan PBB memakan waktu selama dua bulan dikarenakan terdapat persingungan kepentingan yang besar antara Amerika Serikat dan Cina. Kendati demikian, Resolusi 2321 tetap diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB dan Resolusi tersebut terlihat jelas merefleksikan kepentingan dasar kebijakan Cina di dalamnya terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara, yaitu dengan menekankan bahwa sanksi yang diberikan kepada Korea Utara tidak boleh mempengaruhi perdagangan biasa (*normal trade*) dan mata pencaharian.³³

Cina memiliki kepentingan dan pandangannya tersendiri mengenai efisiensi sanksi PBB agar Korea Utara kembali untuk berdialog, meski pun di saat yang bersamaan Cina masih membantu Korea Utara akan stabilitas rezimnya. Alhasil, Resolusi 2321 menekankan pada pengecualian untuk “transaksi atau perdagangan yang terjadi atas dasar mata pencaharian nasional Korea Utara dan aktivitas perdagangan tersebut tidak dialokasikan kepada program pembangunan kembali program pembangunan nuklir atau misil balistik” (lihat tabel 4.1).³⁴ Akan

³²Su, Fei dan Saalman, Lora. *China's Engagement on North Korea: Challenge and Opportunity for Europe*. Stockholm

International Peace Research Institute (SIPRI). 2017. Hal. 7.

³³*Ibid*. Hal. 10.

³⁴*Loc. Cit.* Hyu, Kim. Hal. 52-53.

tetapi, pada Resolusi 2321, tidak memberikan atau meyantumkan mengenai definisi yang eksplisit dari “atas dasar tujuan mata pencaharia/*livelihood purposes*” dan hal tersebut menimbulkan kendala untuk menentukan antara mana perdagangan yang sah dan yang mana perdagangan yang akan menodai nilai-nilai dan prinsip PBB (perdagangan yang berkaitan dengan pembangunan nuklir Korea Utara).

KESIMPULAN

Sejak tahun 1956, Korea Utara telah melakukan kerjasama dengan Uni Soviet mengenai pengembangan senjata nuklir. Adanya kerjasama tersebut merupakan hasil yang rasional dari *Proxy War* di Semenanjung Korea. Akan tetapi, sejak jatuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin, Korea Utara tidak memiliki lagi aliansi yang kuat dalam masa-masa tersebut. Akibat dari situasi tersebut, Korea Utara menjadi *isolated country* dan mengembangkan senjata nuklirnya dan pengembangan senjata nuklir tersebut masuk dalam kategori *strategic equalizer* dalam menangkal pengaruh negara-negara lain.

Pada tahun 1985, Korea Utara menjadi anggota dari *Non-Proliferation Treaty* atau NPT yang mengkomodir penggunaan pengembangan nuklir baik sebagai kepentingan sipil atau pun senjata. Akan tetapi, selan 18 bulan Korea Utara menjadi anggota NPT, Korea Utara mendeklarasikan pemundurandirinya yang dikarenakan Korea Utara menilai NPT tidak mampu melindungi keamanan dan mengakui kedaulatan Korea Utara. Sejak saat itu, Korea Utara menjadi

salah satu fokus bagi negara-negara dengan senjata nuklir (*Nuclear Weapon State*) terkhususnya Amerika Serikat.

Kepentingan Amerika Serikat dimulai pada masa Clinton yang memberikan penawaran kepada Korea Utara untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya. Pada masa Clinton, Amerika Serikat memberikan bantuan kemanusiaan, energi, ekonomi, dan pembangunan. Hal tersebut terlihat pada pengiriman bantuan Amerika Serikat berupa *Light Water Reactor* (LWR) yang akan digunakan untuk pembangunan energi Korea Utara, komisi untuk orang hilang (veteran), bantuan pangan, bahan bakar, dll. Hal tersebut tertuang pada kesepakatan bersama, *Agreed Framework of 1994*. Kendati demikian, Amerika Serikat pada masa Clinton pun gagal dalam mencapai denuklirisasi Korea Utara. Amerika Serikat pindah ke tampuk kepemimpinan Bush dan pada masa pemerintahannya, Bush mencermati kejadian yang dialami Amerika Serikat pada masa Clinton, yaitu Korea Utara yang hanya mengentikan (*stop*) bukan membongkar habis (*dismantle*) fasilitas nuklirnya di Situs Yongbyon. Akan tetapi, Korea Utara pada masa ini sudah masuk ke tahap stabil dikarenakan bantuan-bantuan yang masif dari Amerika Serikat. Di samping itu, Amerika Serikat di bawah administrasi Bush terkendala pada Perang Irak yang mana Amerika Serikat sangat terlibat dalam hal ini. Alhasil, Amerika Serikat pada masa Bush juga gagal dalam mencapai kepentingan dasarnya; denuklirisasi Korea Utara.

Pada masa administrasi Obama, Amerika Serikat mengubah jalan kebijakan strategisnya terhadap Korea Utara, jika pada masa Clinton

dapat disebut “*Carrot*” dan pada masa Bush dapat dianalogikan sebagai “*Stick*”, pada masa Obama, kedua hal tersebut tidak ada dan kebijakan strategis Amerika Serikat pada Korea Utara tertera pada kebijakan “*Strategic Patience*” yang menekankan pada kerjasama trilateral, *military deployment*, dan advokasi terhadap negara-negara di sekitar Korea Utara. Pada masa administrasi Obama, Amerika Serikat juga memberikan sanksi dan embargo ekonomi kepada Korea Utara berdasarkan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat langsung dan kordinasinya dengan Dewan Keamanan PBB yang menghasilkan sederet Resolusi yang berisikan sanksi embargo kepada Korea Utara. Akan tetapi, dalam perjalanannya, Amerika Serikat berdasarkan *Strategic Patience* sangat reaktif dan berujung pada terkekangnya kepentingan Amerika Serikat sendiri. Di sisi yang berlawanan, Amerika Serikat gagal dalam melakukan komunikasi dengan Cina yang disematkan sebagai negara yang paling dominan di Asia Timur dan juga pada Korea Utara.

Kegagalan tersebut dapat dilihat pada perbedaan pendapat antara Cina dan Amerika Serikat mengenai efektivitas sanksi yang diberikan kepada Korea Utara. Alhasil, pada Resolusi 2321 menyantumkan kepentingan Cina. Sikap Cina pada Resolusi ini berjalan kebalikan dari pernyataan dan prinsipnya dalam pemberian sanksi dan embargo ekonomi kepada Korea Utara. Jika dilihat, sebelum diadopsinya Resolusi 2321, Cina menyetujui Resolusi lainnya untuk tidak melakukan hubungan perdagangan dengan Korea Utara, namun Cina tetap melakukan

hubungan perdagangan, baik transaksi, impor, mau pun ekspor. Di saat bersamaan, Cina merasa terancam dengan aktivitas penyebaran militer THAAD dan kerjasama antara Jepang dan Korea Selatan dibawah GSOMIA. Cina menilai bahwa aktivitas dan penyebaran militer kedua negara tersebut membahayakan kepentingan dan keamanannya di kawasan tersebut.

Pada intinya, Amerika Serikat berdasarkan *Strategic Patience* tetap gagal dalam mencapai denuklirisasi Korea Utara. Kegagalan tersebut didukung juga oleh *China Factor* yang memiliki dominasi yang besar pada kawasan dan Korea Utara. Kegagalan Amerika Serikat tersebut juga didukung oleh pandangan dasar *Strategic Patience* yang hanya mengedepankan sisi ultimatum kepada Korea Utara berupa penghentian program nuklirnya agar bisa melanjutkan dialog lebih lanjut pada *Six-Party Talks*. Jika dilihat, Amerika Serikat terbentur pada sisi internal *Strategic Patience* sebagai narasi wacana kebijakan politik luar negerinya terhadap Korea Utara. Narasi wacana tersebut menghasilkan sikap yang pasif dalam keterlibatannya kepada Korea Utara. Dengan demikian, Korea Utara tetap melakukan ujicoba nuklir yang melakukan provokasi. Pada sisi yang bersamaan, Amerika Serikat gagal dalam menciptakan *regional domination* di Asia Timur yang menyebabkan timbulnya *China Factor* yang dianggap sebagai mitra Amerika Serikat untuk memukul mundur pengaruh Korea Utara. Miskalkulasi Amerika Serikat kepada Cina juga merupakan dampak luar (*queer*) dari *Strategic Patience*, yaitu meningkatkan kekuatan militer

trilateral antara Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan—dan juga kesepakatan kerjasama militer antara Jepang dan Korea Selatan. Dengan adanya peningkatan kekuatan militer tersebut dan berimbas pada *military expenditure* Korea Selatan, Cina menilai keadaan tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi dan kepentingannya. Dengan demikian, Amerika Serikat gagal dalam dua hal untuk mencapai denuklirisasi; gagal untuk menciptakan pengaruh di dalam *Six-Party Talks* dan gagal dalam meraih dominasi di Asia Timur. Hal tersebut berujung pada gagalnya kebijakan *Strategic Patience* pada masa pemerintahan Barack Obama.

Daftar Pustaka

Jurnal:

- Fitzpatrick, Mark. *North Korean Security Challenges: A Net Assessment*. International Institute for Strategic Studies. London. 2011.
- William J. Perry, "Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crises," *Annals of the American Academy of Political Science*, Vol. 607 (Sage Publications, Inc. 2006).

Buku:

- Elman, Colin. *Realism*. Dalam "*International Relations Theory for the Twenty-First Century*". Routledge. New York, Amerika Serikat. 2007.
- Fitzpatrick, Mark. *North Korean Security Challenges: A Net Assessment*. International Institute for Strategic Studies. London. 2011.
- Holsti, K.J. *Governance Without Government: Order and Change in World Politics* dalam

Governance Without Government: Polyarchy in Nineteenth-Century European International Politics. Cambridge Press.

- James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press. 1976.
- Research Service Report. Washington DC. 2014.
- Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta. LP3ES. 1994.
- Su, FeidanSaalman, Lora. *China's Engagement on North Korea: Challenge and Opportunity for Europe*. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 2017.
- T May Rudy, *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang dingin*, cetakan pertama, Bandung, PT Refika Aditama. 2002.
- T.B. Millar, "on Writing About Foreign Policy", dalam James N. Rosenau (ed), *International Politics and Foreign Policy*, New York: The Fice Press, 1969.

Publikasi Resmi:

Ballistic and Cruise Missile Threat. Laporan dari National Air and Space Intelligence dengankontribusiDefense Intelligence Agency Missile and Space Intelligence Center dan Office of Naval Intelligence. NASIC Public Affairs Office NASIC/PA 4180 WATSON WAY WRIGHT-PATTERSON AFB, OH 45433-5625. 2013.

- Cha, D. Victor. *Assessing the North Korea Threat and U.S Policy: Strategic Patience or Effective Deterrence?*. Statement before the Senate Committee on Foreign Relations Subcommittee on East Asia, the Pacific, and International Cybersecurity Policy. Washington DC. 2015.
- Chanlett-Avery, Emma dan Rinehart, E. Ian. *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situations*. Congressional Research Service Report. Washington DC. 2014.
- Committee for Human Rights in North Korea. *Lives for Sale: Personal Accounts of Women Fleeing North Korea to China*. Washington DC. 2009.
- Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks," Diakses melalui <https://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm> pada 27 Juni 2018.
- Pritchard, L. Charles dan Tielli Jr, Jhon H. *U.S Policy Toward the Korean Peninsula*. Independent Task Force Report No. 64. Council on Foreign Relations. New York. 2010.
- Six-Party Talks*. Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes Center for Nonproliferation Studies. 2011. SP-1.
- United Nations Security Council Resolution 1718*. 2006. Diakses melalui un.org pada 12 Juni 2018.
- Internet:**
<https://www.bbc.com/news/world-asia-41095772> diakses pada 12 Juni 2018.
<https://www.nytimes.com/2007/01/18/world/asia/18iht-north.4255039.html> diakses pada 12 Juni 2018.
<https://www.iaea.org/topics/leubank/what-is-leu> diakses pada 13 Juni 2018.
<https://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/NEFW/Technical-Areas/RRS/conversion.html> diakses pada 13 Juni 2018.
 Albright, David. *North Korean Miniaturization*. <http://38north.org/2013/02/albright021313> diakses pada 20 Juni 2018.
 UN Press. *Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270 (2016)*. Diakses melalui